

Proses Penanganan Sampah Secara Kolaboratif Antara Swadaya Masyarakat dan Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Tingkat Kelurahan (Kasus Penanganan Sampah di Kelurahan Jembatan Lima Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat)

Edwin Rinaldo

Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Administrasi dan Kebijakan Publik Pascasarjana Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Email edwinrinaldo@yahoo.co.id

Amy Yayuk Sri Rahayu

Staf pengajar pada Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia
Email : amy.sri.rahayu@gmail.com

Abstrak

Penanganan sampah merupakan salah satu wujud pelayanan publik dari pemerintah, disisi lain masyarakat juga harus berpartisipasi serta berkolaborasi dengan pemerintah didalam penyelenggaraan, pengambilan keputusan, dan pengawasan penanganan sampah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menjawab bagaimana proses tata kelola kolaboratif dalam penanganan sampah antara swadaya masyarakat dengan PPSU tingkat Kelurahan serta faktor- faktor yang mempengaruhinya . Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penanganan sampah secara kolaboratif telah terbangun dengan adanya keterlibatan aktor pemerintah dan non pemerintah, terdapat pembagian kewenangan, kerjasama antara Partisipasi swadaya masyarakat, Organisasi Bank Sampah Masyarakat, PPSU Tingkat Kelurahan dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat yang bekerja sama dengan pihak swasta. Telah terbangun dialog, kepercayaan, pemahaman, komitmen hingga mencapai hasil antara. Keterlibatan swasta dalam proses tata kelola kolaboratif masih terbatas pada tahapan kegiatan pemilahan sampah. Penelitian juga menemukan bahwa proses kolaboratif ini belum sempurna faktor- faktor yang turut mempengaruhi antara lain masih rendahnya pemahaman masyarakat akan pemilahan sampah, pola pikir masyarakat yang masih tradisional dalam penanganan sampah, kurangnya motivasi petugas sampah RT dan RW serta prasarana dan manajemen pengangkutan yang kurang optimal. Untuk itu diperlukan sosialisasi, penyuluhan yang lebih intensif, pendampingan untuk mengubah perilaku masyarakat serta inovasi didalam merangsang partisipasi aktif dari masyarakat.

Kata Kunci :

Tata Kelola Kolaborasi, Penanganan Sampah, pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, PPSU

Abstract

Waste management is one form of public service from the government. On the other hand the community must also participate and collaborate with the government in the implementation, decision making, and supervision of waste handling. By using a descriptive qualitative approach, this study answers how collaborative governance processes in handling waste between community self-help and Public Facility Maintenance Officers (PPSU) and the factors that influence it. The results of the study show that collaborative waste management processes have been built with the involvement of government and non-government actors, there are a division of authority, collaboration between community self-help, community waste bank organization, public facility maintenance (PPSU) and the jakarta barat Environment agency in collaboration with the private sector. Dialogue, trust, understanding, commitment have been established to achieve temporary result. Private involvement in collaborative governance processes is still limited to the stages of waste sorting activities. Research also found that this collaborative process was not perfect. factors

that influence, among others are the low understanding of the community about sorting waste, the people's mindset that is still traditional in handling waste, lack of motivation from garbage officers, and less optimal infrastructure and management of garbage truck transportation. For this reason, socialization, more intensive counseling, assistance to change community behavior and innovation in stimulating active participation from the community are needed.

Keywords :

Collaborative Governance, Waste Management, waste sorting, waste collection, waste transportation, Facility Maintenance Officers (PPSU)

A. PENDAHULUAN

Masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan kebersihan terutama didalam bidang penanganan sampah yang berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah, namun disisi lain masyarakat juga harus terlibat dan berpartisipasi serta berkolaborasi dengan pemerintah didalam penyelenggaraan, proses pengambilan keputusan, dan pengawasan pengelolaan sampah (Perda Prov DKI Jakarta 3/2013). Kota Jakarta sebagai Ibukota Negara mengalami pembangunan yang pesat serta tingginya arus urbanisasi penduduk. Kondisi ini akan mengakibatkan terjadinya perluasan lahan yang dibutuhkan untuk tempat tinggal, lahan perkantoran serta membawa dampak negatif bagi lingkungan salah satunya dalam hal penanganan masalah sampah. Di daerah padat, akibat terbatasnya tempat penampungan sampah, seringkali sampah dibuang pada tempat yang tidak semestinya seperti dibiarkan tergeletak di bahu jalan, dibuang ke saluran. Untuk itulah Penanganan sampah di kota besar seperti Jakarta perlu dilaksanakan dengan pendekatan kolaboratif yang terpadu agar dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat baik dari segi ekonomi, kesehatan, manfaat bagi lingkungan serta terjadi adanya perubahan perilaku masyarakat.

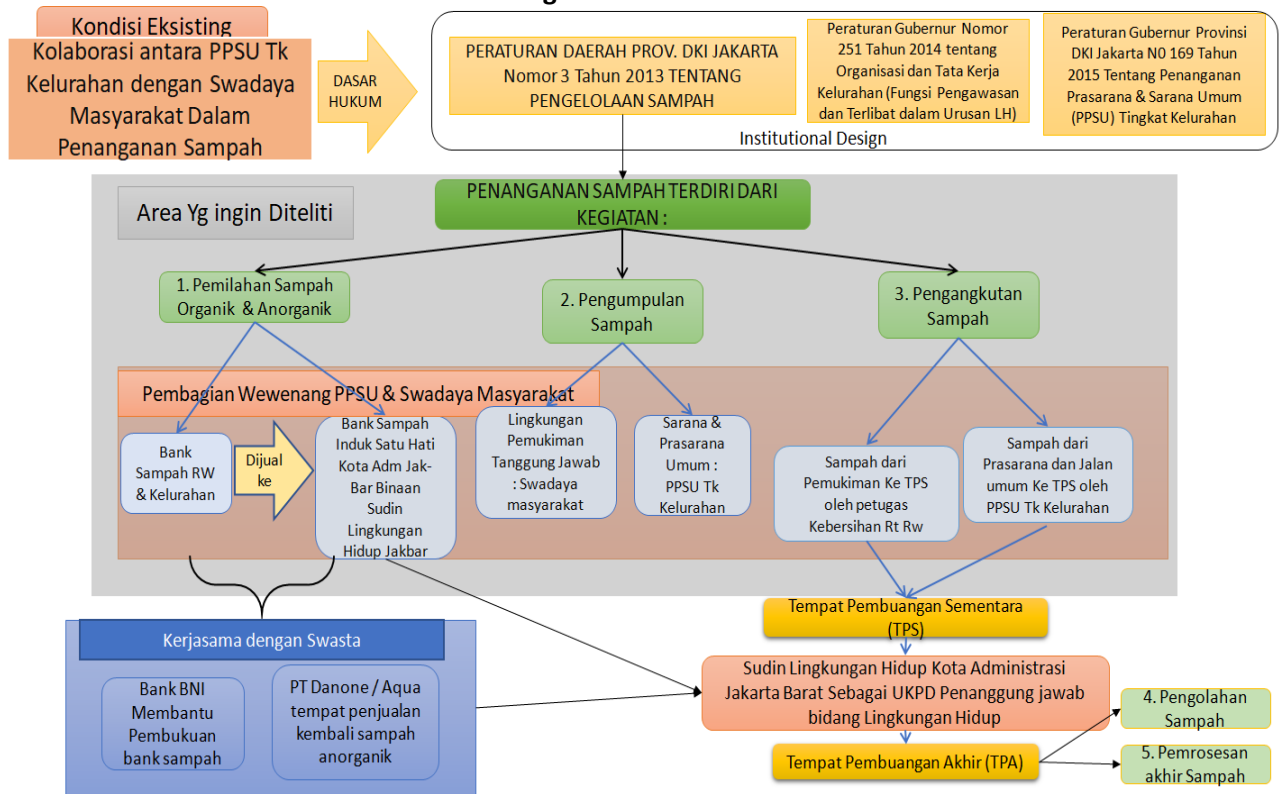
Kota Administrasi Jakarta Barat merupakan kota yang memiliki laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 1,28 persen pada tahun 2017. Selain itu Kota Jakarta Barat juga menjadi kota terpadat dengan jumlah

penduduk sebesar 2,53 juta jiwa dan kepadatan penduduk mencapai 19,52 juta jiwa/km² (BPS, 2017). Jumlah produksi sampah per hari di DKI Jakarta adalah sebanyak 7147,36 Ton Dengan produksi sampah per hari terbanyak terdapat di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur (1849 Ton/hari) dan Kota Administrasi Jakarta Barat (1574 Ton/hari) (BPS, 2017).

Kelurahan Jembatan Lima merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu 53.591 jiwa / km² dan juga angka Produksi / timbunan sampah per hari yang paling tinggi dari daerah lainnya di Provinsi DKI Jakarta, sehingga menjadi menarik untuk meneliti bagaimana bentuk kolaborasi antara swadaya masyarakat dan pemerintah dalam hal ini Kelurahan sebagai lini terdepan pelayanan publik di bidang penanganan sampah.

Melihat kondisi diatas, Pemda DKI mengantisipasinya dengan mengeluarkan Perda Nomor 3 (tiga) Tahun 2013 tentang Pengelolaan sampah yang kemudian diikuti Peraturan Gubernur Nomor 251 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan yang mengatur Fungsi Kelurahan untuk salah satunya terlibat langsung didalam penanganan sampah dan selanjutnya muncul Peraturan Gubernur Provinsi DKI NO 169 Tahun 2015 Tentang Penanganan & Prasarana Umum (PPSU) Kelurahan sebagai mitra kerja yang berada dibawah Kelurahan yang salah satu fungsinya adalah penanganan segera masalah persampahan di ruang publik di Tingkat Kelurahan.

Gambar 1 Kolaborasi Penanganan Sampah antara Swadaya Masyarakat dengan PPSU tingkat Kelurahan



Sumber : Olahan Penelitian

Proses Kolaborasi antara swadaya masyarakat, PPSU tingkat Kelurahan dalam penanganan sampah pada penelitian ini dibatasi pada tiga aktivitas yaitu pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Sampah sementara (TPS). Dari gambar diatas terlihat adanya proses kolaborasi dalam penanganan sampah. Aspek – aspek tradisional mulai ditinggalkan dengan adanya kolaborasi yang dimana didalamnya terdapat interaksi, kerjasama, kompromi beberapa pemangku kepentingan. Nilai-nilai yang mendasari suatu kolaborasi adalah adanya tujuan yang ingin dicapai bersama, persepsi dan kemauan untuk berproses secara bersama- sama, saling bermanfaat bagi sesama, saling jujur, serta berbasiskan masyarakat (CIFOR/PILI, 2005).

Proses penanganan sampah di Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat telah terbangun ke arah kolaboratif dengan adanya peserta yang berasal dari aktor

pemerintah dan non pemerintah. Adanya pembagian kewenangan tugas, kerjasama dan tanggung jawab antara Partisipasi swadaya masyarakat, Organisasi Bank Sampah Masyarakat, PPSU Tingkat Kelurahan dan Suku Dinas (Sudis) Lingkungan Hidup Kota Adm. Jakarta Barat yang bekerja sama dengan pihak swasta didalam pembukuan bank sampah (Bank BNI) dan penjualan kembali barang daur ulang (Danone).

Kolaborasi antara swadaya partisipasi masyarakat dengan PPSU ini telah berlangsung kurang lebih tiga tahun. Kondisi terkini Kolaborasi terdapat indikasi, PPSU menjadi lebih dominan didalam penanganan sampah. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya jumlah volume sampah yang ditangani secara swadaya oleh masyarakat dan disisi lain terdapat peningkatan Volume Sampah Organik yang berasal dari kegiatan domestik sehari- hari warga yang beralih menjadi beban PPSU seperti yang terdapat di Tabel berikut :

Tabel I Total Volume Sampah Organik dan Anorganik Di Kelurahan Jembatan Lima yang ditangani swadaya masyarakat dan PPSU tahun 2015 sampai dengan 2017 (Dalam Ton)

Jenis Sampah	2015				2016				2017			
	Total	Ditangani Swadaya Masyarakat	Ditangani PPSU	Sisa tidak Tertangani	Total	Ditangani Swadaya Masyarakat	Ditangani PPSU	Sisa tidak Tertangani	Total	Ditangani Swadaya Masyarakat	Ditangani PPSU	Sisa tidak Tertangani
Sampah Organik	25.99	18.20	7.79	1.02	27.57	11.20	16.07	0,79	29.55	9.80	18.92	1.23
Sampah Anorganik	22,37	8.00	13.35		23.74	7.53	15.72		25.54	6.80	18.24	
Jumlah	48,36	26.20	21.14	1.02	51.31	18.73	31.79	0,79	54.99	16.60	37.16	1.23

Sumber : diolah dari data laporan Tahunan Kewilayahan Kelurahan Jembatan Lima dan Data Satpel Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Tambora Tahun 2018

Faktual problem selanjutnya terjadi penurunan kinerja petugas sampah RT dan RW penyebabnya adalah keengganan warga mengeluarkan biaya tambahan untuk pengangkutan sampah, sehingga motivasi Petugas sampah RT dan RW juga menjadi rendah, sehingga terdapat kondisi beberapa petugas sampah mengundurkan diri, selain itu prasarana gerobak sampah yang ada juga kurang optimal. Silalahi dalam Pesadi (2013)

mengatakan pengangkutan sampah dari tempat penimbunan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara (TPS) telah diupayakan oleh Dinas Lingkungan Hidup selesai sebelum jam 08.00 pagi. Namun kenyataannya pekerjaan itu tak jarang berlangsung sampai siang hari. Karena petugas sampah Rw memakai gerobak dan tenaganya juga sedikit kapasitas mereka terbatas.

Tabel 2 Petugas Sampah yang dikelola Pengurus Rw serta prasarana gerobak sampah yang dimiliki Rw Se Kelurahan Jembatan Lima Tahun 2015 – 2017

No	RW	Jumlah Petugas Sampah			Jumlah Gerobak Sampah yang dimiliki Petugas Sampah Rw		Ket.
		2015	2016	2017	Berasal dari Pemerintah	Swadaya Masyarakat	
1	1	3 Orang	3 Orang	3 Orang	6	4	
2	2	4 Orang	4 Orang	4 Orang	6	2	
3	3	4 Orang	3 Orang	3 Orang	6	1	
4	4	5 Orang	5 Orang	5 Orang	6	2	
5	5	6 Orang	6 Orang	5 Orang	6	2	
6	6	5 Orang	5 Orang	4 Orang	6	2	
7	7	5 Orang	5 Orang	4 Orang	6	2	
8	8	6 Orang	6 Orang	4 Orang	6	2	
Jumlah		38 Orang	37 Orang	32 Orang	48	17	

Sumber : Laporan Kewilayahan Kelurahan Jembatan Lima Tahun 2015 - 2017

Pada Proses Pengolahan sampah baik untuk jenis sampah Organik maupun Anorganik, meski telah terbangun tata kelola kolaboratif, namun hingga bulan Mei tahun 2018 transaksi hasil penjualan nilai ekonomis

sampah yang di jual ke Bank Sampah Induk Kota Administrasi Jakarta Barat masih minim. Meskipun terdapat 10 bank sampah yang dibentuk oleh pengurus Rt, Rw maupun Kelurahan hanya 2 bank sampah saja yang

rutin menimbang hasil pemilahan sampahnya ke Bank Sampah Induk Satu Hati milik Sudis LH Kota Administrasi Jakarta Barat. Dapat diindikasikan bahwa partisipasi masyarakat

dalam pemilahan sampah dan penjualan hasil pemilahan sampah tersebut ke bank sampah yang sudah dibentuk di Rwnya masing-masing masih rendah.

Tabel 3. Bank Sampah di wilayah Kelurahan Jembatan Lima Kota Adm. Jakarta Barat berikut rata-rata transaksinya dari bulan Januari sd Mei 2018

No	RW	Nama Bank Sampah	Jumlah Nasabah	No SK Pendirian	Tanggal SK Pendirian	Nama Ketua	Alamat	Jumlah Transaksi Ke Bank Sampah Induk Sudis LH (sd Mei 2018)
1	1	Bank Sampah Pasar Mitra	10 Orang	18 Tahun 2017	03 Nov 2017	H. Dudung	Pasar Jembatan Lima, Jln KH Moch Mansur	Rp210.000
2	2	Bank Sampah Jembatan Lima Raya	10 Orang	17 Tahun 2017	03 Nov 2017	Lurah Jembatan Lima	Jln Stasiun Angke Rt 014 Rw 04	Rp245.000
3	3	Bank Sampah Rw 01	10 Orang	23 Tahun 2017	27 Des 2017	Idham Fadilah	Rw 01 Kelurahan Jembatan Lima	
4	4	Bank Sampah Rw 02	14 Orang	24 Tahun 2017	27 Des 2017	Chaerul Anwar	Rw 02 Kelurahan Jembatan Lima	
5	5	Bank Sampah Rw 03	11 Orang	25 Tahun 2017	27 Des 2017	Muhayat	Rw 03 Kelurahan Jembatan Lima	
6	6	Bank Sampah Rw 04	14 Orang	26 Tahun 2017	27 Des 2017	Robby	Rw 04 Kelurahan Jembatan Lima	
7	7	Bank Sampah Rw 05	13 Orang	27 Tahun 2017	27 Des 2017	M. Nurjaman	Rw 05 Kelurahan Jembatan Lima	
8	8	Bank Sampah Rw 06	14 Orang	28 Tahun 2017	27 Des 2017	Sukardi	Rw 06 Kelurahan Jembatan Lima	
9	9	Bank Sampah Rw 07	11 Orang	29 Tahun 2017	27 Des 2017	Sofwan	Rw 07 Kelurahan Jembatan Lima	
10	10	Bank Sampah Rw 08	12 Orang	30 Tahun 2017	27 Des 2017	Indradi	Rw 08 Kelurahan Jembatan Lima	

Sumber : Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat Tahun 2018

B. Rumusan Permasalahan

Dengan melihat beberapa permasalahan yang ada maka pertanyaan penelitian yang kemudian muncul adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses Tata Kelola Kolaborasi Penanganan Sampah antara Masyarakat dengan Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum tingkat Kelurahan ?
2. Faktor – faktor apa saja yang berpengaruh terhadap penanganan sampah secara kolaboratif antara Masyarakat dengan Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum tingkat Kelurahan ?

C. Tinjauan Literatur

1. Governance

Definisi Governance pada umumnya menunjuk kepada serangkaian aktivitas ataupun suatu proses interaksi dan hubungan dalam pemerintahan. Definisi dari UNDP

(1997) menyatakan bahwa governance ialah suatu bentuk pelaksanaan kewenangan ekonomi, politik dan administratif untuk mengelola urusan negara. UNDP juga menyatakan bahwa governance ialah suatu proses, mekanisme, dan kompleksitas hubungan antara warga negara dan kelompok-kelompok yang mengartikulasikan kepentingannya didalam melaksanakan hak dan kewajibannya serta memfasilitasi perbedaan-perbedaan yang ada antara mereka.

Perkembangan dari Paradigma Ilmu administrasi publik sangatlah dinamis, diawali dari paradigma OPA (*Old Public Administration*) yang bersifat kaku, sentralistik, serta kurang merespon kebutuhan masyarakat, kemudian bergeser ke paradigma baru yaitu NPM (*New Public Management*), NPS (*New Public Services*) yang kemudian dikenal dengan konsep *Good Governance*. Menurut UNDP (*United Nations Development Programme*) karakteristik dari *Good governance* menurut Rondinelli (Rondinelli, 2007: 7) terdiri dari : partisipasi,

penegakan hukum, transparan, cepat tanggap, berorientasi pada konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi.

Tata kelola pemerintahan yang baik dapat menjamin sinergitas atau kolaborasi antara para pemangku kepentingan baik *state actor* dan *nonstate actor* dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, implementasi, maupun evaluasi. Kolaborasi tidak hanya dilakukan untuk tujuan masing-masing aktor, namun untuk tujuan yang lebih besar. Berikut peranan dari masing masing aktor (suhandy dan Fernanda, 2001).

1. Negara / Pemerintah : Pengertian Negara umumnya mencakup lembaga politik (legislatif, eksekutif, yudikatif) dan sektor publik. Peranan serta tanggung jawab Negara diantaranya menyelenggarakan kekuasaan dalam bentuk memerintah dan membangun lingkungan yang kondusif untuk mencapai tujuan pembangunan ;
2. Sektor swasta : Peran swasta dalam pembangunan adalah sebagai sumber peluang untuk peningkatan produktifitas, menyerap tenaga kerja, sumber penerimaan, investasi publik serta pertumbuhan ekonomi. Swasta disini mencakup insan usaha yang aktif dalam interaksi sistem pasar seperti industri, perdagangan, jasa, koperasi, perbankan dan sektor informal ;
3. Masyarakat (*Civil Society*) diartikan sebagai kumpulan institusi atau organisasi non pemerintah dan sektor swasta dan dapat berupa ruang tempat kelompok -kelompok sosial dapat bergerak. bentuknya adalah

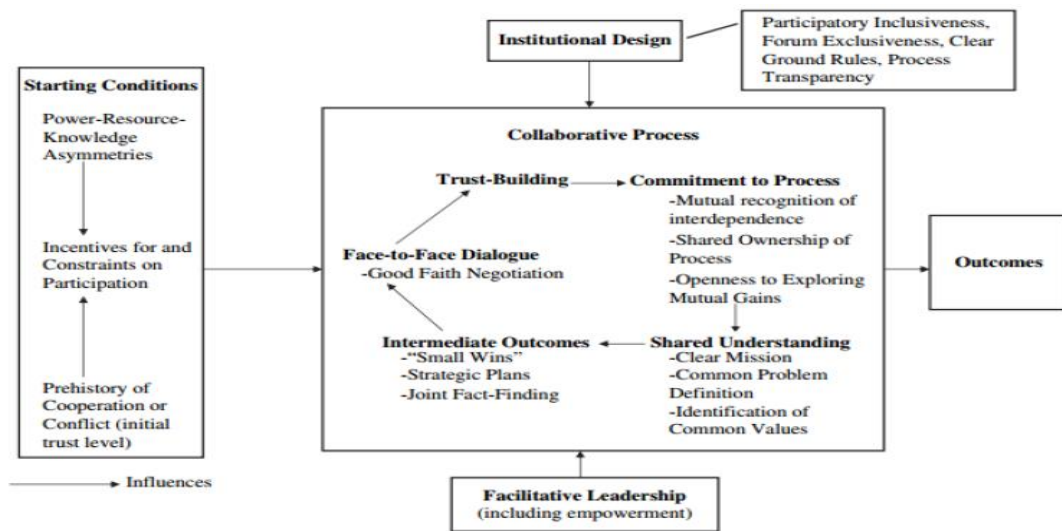
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Non Pemerintah, akar rumput, media, institusi pendidikan, asosiasi profesi, organisasi keagamaan, dan lain lain.

2. Collaborative Governance Chris Ansell dan Allison Gash (2007)

Tata kelola kolaborasi menurut Ansell & Gash (2007, P;544) adalah suatu pengaturan yang dilakukan dimana terdapat satu atau lebih lembaga publik, dilakukan pemerintah dan melibatkan aktor *non negara* sebagai pemangku kepentingan didalam pengambilan keputusan secara kolektif dan formal, berorientasi pada konsensus dan deliberatif dengan tujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik, atau pengelolaan aset publik.

Pengertian dari tata kelola kolaborasi yang disebutkan oleh Chris Ansell dan Gash di atas setidaknya meliputi enam parameter antara lain : (1) adanya musyawarah tata kelola kolaborasi yang di-inisiasi oleh institusi publik / lembaga ; (2) terdapat non state actors sebagai partisipan didalam forum tata kelola kolaborasi ; (3) proses pembuatan keputusan melibatkan partisipan secara langsung, partisipan tidak hanya berkonsultasi dengan lembaga publik ; (4) forum ini diorganisir secara formal dan memiliki intensitas pertemuan yang kolektif ; (5) keputusan yang dihasilkan oleh forum diperoleh melalui consensus ; dan (6) proses kolaborasi difokuskan kepada *public policy* maupun *public management*.

Bagan 1.
Model Tata Kelola Kolaborasi Ansell & Gash



Tergambar pada bagan diatas bahwa kondisi awal dari tata kelola kolaborasi disebabkan oleh *starting condition* berupa adanya kewenangan ataupun ketidakseimbangan sumber daya, yang menyebabkan dorongan atau penghambat pada partisipasi serta terdapatnya sejarah konflik dan kerja sama sebelumnya. Kolaborasi merupakan suatu proses yang selalu berulang. Melalui membangun kepercayaan diantara pemangku kepentingan untuk membangun komitmen bersama dalam menjalankan suatu proses, membagi ilmu dan pemahaman untuk mendapatkan beberapa hasil antara dan juga diadakan suatu komunikasi bersama antar pihak untuk bernegosiasi dalam memutuskan sesuatu. Dialog antar muka adalah juga bagian dari sarana membangun kepercayaan. Siklus ini akan terjadi terus berulang-ulang dalam kolaborasi.

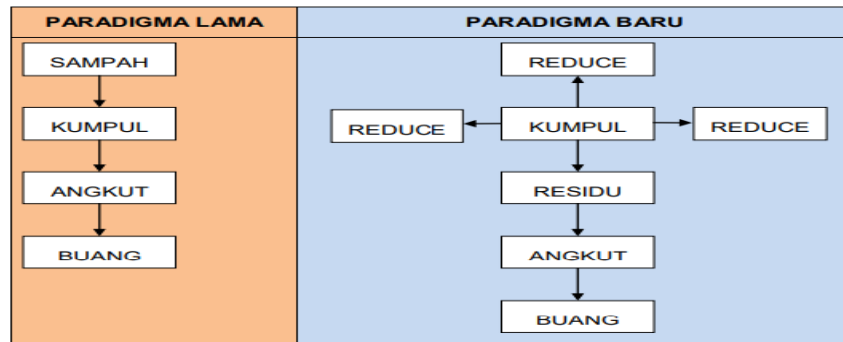
Dalam kolaborasi juga perlu dibangun institusional desain. Terdapat partisipasi yang bersifat terbuka (inklusif), adanya ketransparanan aturan, keterbukaan dan

proses yang transparan. Dalam institusional desain, dalam proses kolaboratif juga harus didukung oleh kepemimpinan yang fasilitatif. Rangkaian keseluruhan proses kolaborasi tersebut, diharapkan dapat menghasilkan manfaat yang besar dalam melaksanakan kebijakan maupun mengelola aset publik.

3. Model Kolaboratif dalam Penanganan Sampah

Salah satu upaya untuk menyelesaikan permasalahan sampah adalah dengan menggunakan metode pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat, atau yang biasa disebut model 3R+1P (*Reduce, Reuse, Recycle, Participation*) inti prinsip dari model ini adalah Pengelolaan sampah secara langsung dari sumber sampah melalui berbagai langkah yang bertujuan meminimalisir jumlah sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir.”

Gambar 2 Paradigma lama dan Baru di dalam Pengelolaan sampah



Sumber : Modul Sampah 3R Puskim PU, 2010

Prinsip-prinsip atau pola yang dapat digunakan dalam penanganan sampah antara lain terdiri dari prinsip “3-R, 4-R atau 5-R. Penanganan sampah dengan 3-R adalah konsep penanganan sampah melalui cara reduce (mengurangi), reuse (menggunakan kembali) dan recycle (mendaur-ulang sampah), sedangkan 4-R ditambah satu R yaitu *replace* (mengganti) sampah mulai dari sumbernya. Pada pemakaian prinsip 5-R selain 4 prinsip tersebut di atas ditambahkan lagi dengan *Replant* (penanaman kembali). Pola penanganan sampah 4-R dianggap penting” serta efektif dan efisien untuk diterapkan dalam rangka pengelolaan sampah padat di perkotaan, sehingga diharapkan dapat mengurangi biaya pengelolaan sampah. Sedangkan usaha 3-R sendiri ditujukan untuk mengurangi dampak lingkungan serta meningkatkan nilai ekonomis dari sampah.

D. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena peneliti menurunkan konsep, variabel, dan indikator mengenai proses tata kelola kolaborasi dan hal-hal yang mempengaruhinya dari teori Ansell and Gash (2007). Peneliti mencoba menggali dan memahami pemaknaan apa yang terjadi pada suatu permasalahan khususnya dalam Pengelolaan sampah secara kolaboratif antara swadaya Masyarakat dengan PPSU Tingkat Kelurahan. Peneliti menggunakan alur pemikiran deduktif ke induktif atau dimulai dari menurunkan teori awal dan dikaitkan dengan hasil penelitian dilapangan.

E. Pembahasan dan analisa

Berikut ini akan di jabarkan hasil pembahasan dan analisa dari penelitian dengan menggunakan Teori tata kelola kolaboratif Chris Ansell dan Allison Gash (2007).

1. Proses Tata kelola Kolaborasi

A. Dialog Tatap Muka

Sebagai sebuah proses yang berorientasi pada konsensus, komunikasi intensif yang dilakukan melalui dialog langsung diperlukan bagi pemangku kepentingan untuk membicarakan (negosiasi) peluang keuntungan yang dapat dicapai bersama, oleh karena itulah semua tata kelola kolaboratif dibangun dengan didasari dialog tatap muka (Ansell dan Gash, 2007).

Forum informal penting karena di forum informal tersebut masyarakat lebih nyaman didalam menyampaikan pendapatnya. Pertemuan yang bersifat multilateral diselenggarakan baik secara rutin atau sesuai kebutuhan, baik secara formal maupun informal, dan diinisiasi baik oleh Pihak Kelurahan, Pihak Sudis LH maupun oleh masyarakat. media negosiasi yang digunakan ialah dialog tatap muka. Dialog disini tidak hanya digunakan untuk mencapai kesepakatan namun juga sebagai media untuk berbagi informasi dan untuk pemahaman bersama antar pemangku kepentingan. Kepercayaan juga menjadi aspek penting untuk menjadi landasan bagi terbangunnya tata kelola kolaboratif penanganan sampah antara swadaya masyarakat dengan PPSU Tingkat Kelurahan. Untuk mencapai hasil tata kelola kolaboratif, diperlukan komitmen jangka panjang dari para pemangku

kepentingan untuk saling menjaga kepercayaan, untuk itu diperlukan upaya-upaya untuk membina kepercayaan. Kepercayaan terbangun karena komunikasi yang intensif, dan juga adanya hasil kerja yang nyata yang telah ditunjukkan oleh masing-masing pemangku kepentingan, dan hubungan baik yang telah lama terjalin antar pemangku kepentingan.

B Membangun Kepercayaan

Dalam proses tata kelola tata kelola kolaboratif penanganan sampah antara swadaya masyarakat dengan PPSU Tingkat Kelurahan, upaya-upaya untuk menjaga kepercayaan dilakukan melalui sikap saling menghormati kewenangan dari masing-masing pemangku kepentingan dan sikap menghargai peran dari masing-masing pemangku kepentingan.

Transparansi dalam pengelolaan manajemen penanganan sampah dan retribusi kebersihan merupakan salah satu hal yang diupayakan untuk menjaga kepercayaan. Tidak hanya kepercayaan dari masyarakat yang memberikan sumbangan retribusi melainkan juga kepercayaan dari petugas sampah / kebersihan RT RW sebagai mitra dari RT dan RW dalam penanganan sampah.

Pemangku kepentingan berusaha memberikan bukti kontribusi mereka dalam proses penanganan sampah secara kolaboratif antara swadaya masyarakat dengan PPSU Kelurahan. Hal ini akan memperkuat jalinan kepercayaan antar pemangku kepentingan dan memberikan pembuktian bahwa pemangku kepentingan tidak hanya memperoleh manfaat dari kolaborasi yaitu terciptanya lingkungan bersama yang bersih, nyaman, sehat dan tertata namun juga memberikan sumbangan manfaat. Meskipun masih ada kekurangan seperti belum adanya pembinaan yang berkesinambungan terhadap petugas sampah RT dan RW, karena banyak dari pengurus RT dan RW juga kurang maksimal didalam melakukan pembinaan terhadap petugas kebersihan mereka.

C. Komitmen Terhadap Proses

Dalam tata kelola kolaborasi masing - masing pemangku kepentingan harus punya

komitmen terhadap proses kolaborasi. Dalam berkolaborasi, komitmen menjadi faktor yang penting untuk menentukan keberhasilan maupun kegagalan. Jika komitmen dari pemangku kepentingan kurang, maka hal tersebut akan menjadi suatu permasalahan (Ansell & Gash, 2007: 559).

Beberapa point yang merupakan hasil kesepakatan / komitmen bersama para pemangku kepentingan dalam penanganan sampah secara kolaboratif antara swadaya masyarakat dengan PPSU tingkat Kelurahan, yaitu :

1. Mengurangi volume timbulan sampah dengan melakukan pemilahan sampah anorganik melalui program menabung dengan bank sampah ;
2. Percepatan penanganan pengumpulan sampah baik dari lingkungan pemukiman warga atau dari prasarana umum seperti jalan umum, taman, saluran dan sebagainya agar tercipta lingkungan Kelurahan Jembatan Lima yang bersih dan nyaman ;
3. Percepatan penanganan pengangkutan sampah baik dari lingkungan pemukiman warga atau dari prasarana umum ke Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) .

Dalam proses penanganan sampah secara kolaboratif antara swadaya masyarakat dengan PPSU Tingkat Kelurahan ini, komitmen diawali kondisi Kelurahan Jembatan Lima yang tingkat kepadatan penduduknya dan volume sampah per hari nya masuk kategori tertinggi se Provinsi DKI Jakarta. Sehingga komitmen bersama yang muncul ialah untuk mempercepat proses penanganan sampah sebelum jam 08.00 pagi, agar sarana dan prasarana umum dapat dilalui warga dengan nyaman, berfungsi secara maksimal sehingga mendukung aktivitas warga masyarakat di Kelurahan Jembatan Lima.

Pihak atau pemangku kepentingan yang bertindak sebagai pengingat komitmen yang telah disepakati sangatlah diperlukan didalam proses tata kelola kolaborasi. Pemangku kepentingan yang paling aktif didalam mengingatkan komitmen para

pemangku Kepentingan lain adalah Lurah melalui Kasi Ekbang dan Lingkungan Hidup Kelurahan dan satpel Lingkungan Hidup Kecamatan Tambora. Media yang digunakan untuk mengingatkan adalah melalui dialog langsung dengan masyarakat, pengurus RT dan RW, petugas kebersihan RW dan PPSU maupun pelaku usaha ketika berada di lapangan.

D. Pemahaman Bersama

Tujuan utama dari diadakannya program penanganan sampah antara swadaya masyarakat dengan PPSU tingkat Kelurahan ini adalah antara lain :

1. Guna mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan
3. Menjadikan sampah sebagai sumberdaya yang memiliki nilai ekonomis
4. Mewujudkan pelayanan prima di bidang penanganan sampah

Permasalahan utama yang timbul dalam proses penanganan sampah secara kolaboratif ini antara lain kemampuan sumber daya dalam hal ini petugas sampah RT dan RW dan prasarana sampah yang dimiliki yang tidak seimbang dengan produksi sampah per hari, pengangkutan truk yang kerap kali terlambat serta pola pikir masyarakat yang masih tradisional dalam penanganan masalah sampah dan belum terbiasa melakukan pemilahan sampah mulai dari lingkungan rumah tangga.

Ketika para pemangku kepentingan sudah sepakat mengenai pemahaman yang menjadi masalah bersama, maka para pemangku kepentingan dapat bersama-sama mencari kesepakatan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dari beberapa kali dialog tatap muka baik secara langsung maupun formal dan analisis masalah bersama, solusi dari permasalahan tersebut dicari bersama-sama.

Solusi lainnya yang bisa jadi alternatif untuk memotivasi para pengurus RT dan RW

serta insan usaha/ masyarakat untuk membenahi atau peduli lingkungan adalah dengan memotivasi mereka dengan cara melombakannya serta perangkat kelurahan harus ada bersama di tengah masyarakat ketika masalah muncul agar mereka lebih semangat dan merasa pemerintah hadir di tengah mereka.

E. Hasil Antara

1. Telah terbentuknya bank sampah di setiap RW guna mendekatkan masyarakat mengubah sampah hasil pilahan menjadi bernilai ekonomis sekaligus bertujuan untuk mengurangi timbulan volume sampah harian yang dihasilkan. Hal ini masih terkendala tingkat kesadaran masyarakat didalam memilah sampah yang dimulai dari rumah tangga mereka masih rendah.
2. Target percepatan pengumpulan sampah dan pengangkutan sampah baik dari lingkungan perumahan maupun prasarana umum sejauh ini dapat tertangani karena ada kerja sama petugas kebersihan RW dan RT yang didukung oleh PPSU Kelurahan walaupun belum sepenuhnya maksimal karena terkendala sumber daya dan prasarana yang kurang dan angkutan truk sampah di TPS yang mengantri dan kerap datang terlambat
3. Keperdulian masyarakat untuk turut berperan serta aktif dalam kebersihan lingkungan seperti ikut serta dalam kerja bakti, tidak buang sampah sembarangan mulai terlihat meningkat di RT atau RW nya peduli terhadap lingkungan.

Upaya pengembangan kolaborasi proses penanganan sampah secara kolaboratif antara swadaya masyarakat dengan PPSU Tingkat Kelurahan ke depannya Pihak Sudis Lingkungan Hidup akan melakukan evaluasi terhadap bank sampah untuk memonitor masalah yang terjadi dan bank sampah mana saja yang tidak aktif, selain itu dalam hal pengumpulan dan pengangkutan akan dimaksimalkan koordinasi dan manajemennya

dan akan dikembangkan juga kerjasama dengan pihak- pihak lain untuk memperluas kolaborasi seperti memberdayakan CSR, bekerjasama dengan LSM yang bergerak di lingkungan hidup.

2. Faktor - faktor yang mempengaruhi proses kolaborasi

A. Kondisi Awal

Kondisi menggambarkan bagaimana kondisi para pemangku kepentingan ketika kolaborasi belum terbangun, kondisi awal ini berpotensi mencegah atau justru mendorong para pemangku kepentingan untuk memulai proses tata kelola kolaboratif. Chris Ansell dan Allison Gash (2007) membagi kondisi awal ini menjadi tiga yaitu ada atau tidaknya ketidakseimbangan sumber daya / kewenangan, sejarah konflik atau suksesnya kerja sama sebelumnya, dan juga aspek insentif (motivasi) dan kendala pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam kolaborasi.

Kondisi awal ketidakseimbangan sumberdaya terlihat dari terbatasnya TPS di Kelurahan jembatan lima, rasio perbandingan volume sampah dengan kemampuan SDM, tingkat kesejahteraan dan prasarana yang dimiliki petugas sampah RT dan RW yang tidak seimbang dengan beban kerja mereka. Setelah adanya PPSU terjadi kolaborasi dan dukungan PPSU untuk percepatan penanganan sampah namun masih ada kendala dalam hal pengangkutan truk sampah di TPS yang kadang terlambat yang disebabkan manajemen dan koordinasi pengangkutan yang kurang maksimal.

Faktor yang memotivasi pemangku kepentingan untuk ikut dalam proses tata kelola kolaboratif penanganan sampah antara swadaya masyarakat dengan PPSU tingkat kelurahan adalah karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh masing-masing pemangku kepentingan, dimana keterbatasan itu dapat ditutupi oleh kehadiran pemangku kepentingan lain. Misalnya masyarakat membutuhkan wilayah yang bersih dan bebas dari sampah, maka pemerintah dapat membangun infrastruktur tempat pembuangan sampah, sarana pengangkutan,

layanan pengumpulan dan pengangkutan sampah. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan wilayah, maka disini peran masyarakat sangat dibutuhkan melalui pengurus RT dan RW dengan melakukan pembinaan kepada warga, meningkatkan partisipasi warga dalam kerja bakti, pemilahan sampah, melakukan pengumpulan dan pengangkutan sampah dari lingkungan perumahan warga ke TPS melalui petugas sampah RT dan RW.

Sedangkan faktor yang menjadi kendala antara lain kesadaran masyarakat dalam mengurangi volume sampah yang dimulai dari rumah tangga masih rendah karena masyarakat belum terbiasa dan memahami sepenuhnya dengan konsep pemilahan sampah. Hal ini juga didorong kapasitas pengurus RT dan RW yang berbeda-beda. Selain itu hkendala lainnya yaitu harga untuk komoditas barang tertentu seperti kardus, bodong di Bank Sampah Induk Satu Hati Jakarta Barat harganya rendah dibandingkan dengan lapak swasta.

Proses tata kolaboratif sulit dibangun diatas sejarah konflik, seperti dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2007) bahwa konflik cenderung membuat tingkat kepercayaan rendah, yang pada gilirannya akan menghasilkan rendahnya tingkat komitmen, strategi manipulasi, dan komunikasi yang tidak jujur. Adanya sejarah konflik menciptakan lingkaran setan dari kecurigaan, ketidakpercayaan, dan stereotip, di sisi lain, sejarah kerja sama masa lalu yang sukses dapat menciptakan modal sosial dan tingkat kepercayaan yang tinggi yang menghasilkan lingkaran kolaborasi yang baik.

Sebelum terbangunnya kolaborasi penanganan sampah, terdapat beberapa konflik seperti melubernya sampah di TPS dan juga terdapatnya titik pembuangan sampah liar dari warga sebagai akibat wadah sampah penuh dan tidak tertangani secara konsisten yang mengakibatkan adanya layangan protes ke pihak Kelurahan sehubungan dengan solusi permasalahan tersebut. Setelah terbangunnya kolaborasi melalui dialog dan pencarian solusi bersama maka permasalahan melubernya sampah di TPS dan juga titik pembuangan sampah liar dapat teratasi.

B. Kepemimpinan Fasilitatif

Dalam jurnalnya, Ansell dan Gash menjelaskan bahwa kepemimpinan dilihat secara luas sebagai bahan yang membawa setiap bagian dalam satu meja dan mengarahkan mereka untuk bekerja sama dalam proses kolaborasi. Kepemimpinan penting untuk mengatur dan menjaga aturan yang jelas, membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog dan mengeksplorasi keuntungan bersama. Menurut Vangen and Huxham (2003) kepemimpinan penting untuk merangkul, membimbing, memberdayakan dan melibatkan pemangku kepentingan dan memobilisasi mereka untuk bergerak berkolaborasi. Pemimpin kolaborasi adalah pelayan dari proses perubahan pelayanan atau fasilitasi kepemimpinan (Chrislip & Larson 1994).

Dalam penanganan sampah secara kolaboratif antara swadaya masyarakat dengan PPSU tingkat kelurahan ini, kepemimpinan fasilitatif yang dominan diperankan oleh Lurah Jembatan Lima dan Kepala Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Tambora. Fungsi Lurah dalam fasilitasi kepemimpinan ialah menterjemahkan apa yang menjadi arahan Walikota dan Camat Tambora ketika mengambil peran dalam pengambilan kebijakan dalam kolaborasi penanganan sampah. Lurah mengkoordinasikan, memfasilitasi adanya ide – ide baru, memberdayakan pemangku kepentingan yang terkait untuk berkolaborasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan fungsi dari Kepala Satuan Pelaksana Sudis LH Kecamatan Tambora berfungsi melaksanakan sosialisasi penanganan kebersihan, melakukan himbauan agar tidak buang sampah sembarangan, sosialisasi bank sampah, melakukan pelayanan penimbangan bank sampah, memonitor aktivitas penanganan sampah yang dilakukan masyarakat dan PPSU kelurahan, menyediakan dan mengkoordinasikan truk sampah untuk pengangkutan dari TPS ke TPA.

Terdapat Upaya dari Lurah Jembatan Lima untuk menggerakkan, menjadi fasilitator

untuk menemukan solusi ketika ada permasalahan yang terjadi dalam kolaborasi, memperluas kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan yang dilakukan melalui dialog forum formal maupun informal. Sedangkan peran pemberdayaan pemangku kepentingan dari Satpel Lingkungan Hidup adalah dengan melaksanakan sosialisasi ke pemangku kepentingan. Dari hasil fasilitasi yang dilakukan pimpinan kolaborasi dalam hal ini Lurah dan Satpel LH Kecamatan, muncul beberapa ide-ide baru yang muncul sebagai bagian dari sumbangsih pemikiran dari para pemangku kepentingan. Kelurahan berfungsi sebagai mediator dengan memfasilitasi dialog dan menjaga proses agar berjalan adil dan transparan.

C. Desain Kelembagaan

Terdapat tiga aturan dasar yang menjadi dasar kolaborasi penanganan sampah antara swadaya masyarakat dengan PPSU tingkat Kelurahan ini. Ketiga aturan tersebut mewajibkan dan melengkapi para pemangku kepentingan untuk saling berkolaborasi. Peraturan dasar yang mendasari adanya kolaborasi penanganan sampah adalah kebijakan pengelolaan sampah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2013. Penyelenggaraan pengelolaan sampah menurut tataran undang- undang tersebut diatas meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah. Penanganan sampah terdiri dari kegiatan Pemilahan sampah, pengumpulan sampah dan pengangkutan sampah. Hal ini diikuti dengan penyempurnaan Peraturan Gubernur Nomor 251 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan yang mengatur Fungsi Kelurahan untuk tidak lagi hanya mengawasi jalannya proses penanganan sampah terlibat langsung didalam usaha atau kegiatan penanganan sampah. Keluarnya Peraturan Gubernur Provinsi DKI Nomor 169 Tahun 2015 Tentang Penanganan & Prasarana Umum (PPSU) Kelurahan menjadi salah satu pemicu dari kolaborasi dimana Kelurahan menjadi memiliki mitra kerja langsung yang berfungsi melakukan percepatan penanganan permasalahan prasarana umum seperti

penanganan segera penanganan sampah di ruang publik di Tingkat Kelurahan.

Sudah terdapat perjanjian kerjasama formal antara Sudis Lingkungan Hidup, Kelurahan, Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya yang tertuang dalam perjanjian kerjasama antara Sudis LH Jakarta Barat, Lurah Se- Jakarta Barat dengan PT Bank BNI 46 dan PT Tirta Investama dalam program ayo menabung dengan bank sampah pada tanggal 30 agustus 2017 yang kemudian diturunkan lagi dalam bentuk SK bank sampah RW dan pakta integritas atau semacam MOU perjanjian kinerja agar pengurus RT dan RW wajib menjaga dan membina keamanan, ketertiban dan termasuk terlibat aktif serta merangsang partisipasi warganya didalam menjaga kebersihan lingkungan.

Proses tata kelola kolaboratif penanganan sampah antara swadaya masyarakat dan PPSU Kelurahan masih didominasi oleh masyarakat melalui pengurus RT dan RW dan pemerintah melalui PPSU Tingkat Kelurahan, peran dari swasta masih terbatas kerjasama bank sampah tidak terlihat adanya peran NGO yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Peran Sudis LH sebagai UKPD yang bertanggung jawab dalam urusan Lingkungan Hidup adalah melakukan sosialisasi, pelatihan, penyuluhan, peningkatan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam penanganan sampah. bagi masyarakat dan Pemerintah Kelurahan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lain adalah cara yang paling efektif untuk mengoptimalkan proses penanganan sampah, sehingga memperkuat motivasi untuk membangun proses tata kelola kolaboratif.

D. Teknologi

Dalam proses tata kelola kolaboratif penanganan sampah antara swadaya masyarakat dengan PPSU Tingkat Kelurahan penggunaan teknologi juga berpengaruh dalam pola dan media komunikasi dan sharing informasi serta dalam hal tindak lanjut dan penyelesaian pelaporan masyarakat. Sharing informasi dapat lebih cepat dan tersebar luas melalui media, termasuk untuk hal -hal yang membutuhkan masukan dan respon cepat dari pemangku kepentingan yang lain,

informasi maupun pendapat dapat di-*share* ke dalam group *Whatsapp* sehingga permasalahan dan cara mengatasinya dapat dipahami bersama dan direspon secara cepat oleh para pemangku kepentingan. Selain penggunaan media online, guna mendukung proses kolaboratif penanganan sampah antara swadaya masyarakat dengan PPSU tingkat kelurahan juga digunakan aplikasi media sosial Qlue sebagai sarana pelaporan bagi masyarakat dan juga aplikasi CRM (*Citizen Relation Management*) sebagai sarana tindak lanjut dan penyelesaian pelaporan dari pihak pemerintah.

3. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Proses tata kelola kolaboratif penanganan sampah antara swadaya masyarakat dengan PPSU tingkat kelurahan telah terbangun antara pemerintah kelurahan, pengurus RT dan RW, petugas sampah RT dan RW, PPSU Kelurahan, Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Tambora dan pihak swasta (BNI 46 dan Danone). Hal ini dikarenakan telah terbentuk adanya kepercayaan dan kesetaraan pemahaman tentang konsep penanganan sampah, komitmen yang ditunjukkan dengan keterlibatan setiap pemangku kepentingan dalam proses kolaborasi, serta hasil antara yang sudah dirasakan oleh pemangku kepentingan, dalam tata kelola kolaborasi ini masih terdapat kekurangan - kekurangan seperti masyarakat belum terbiasa dengan kegiatan memilah sampah, adanya pola pikir masyarakat yang masih tradisional dalam penanganan sampah dan motivasi serta prasarana petugas kebersihan / sampah RT dan RW yang kurang memadai, namun dengan adanya dialog dapat menjadi jembatan untuk membangun kepercayaan, pemahaman, komitmen, mencari solusi bersama dan mendapatkan hasil antara.

2. Keterlibatan pemangku kepentingan swasta dalam proses penanganan sampah secara kolaboratif ini masih terbatas pada kegiatan pemilahan sampah. Sedangkan keterlibatan swasta dalam kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sampah belum terlihat. Masing-masing pemangku kepentingan menjalankan koordinasi dan menjalankan kewenangannya dengan baik, kolaborasi yang terlihat di lapangan nyata dan kuat.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan sebagai masukan maupun pengembangan terhadap tata kelola kolaborasi penanganan sampah antara swadaya masyarakat dengan PPSU tingkat kelurahan ini antara lain :

1. Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Tambora dengan pihak tim dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Adm Jakarta Barat harus Lebih intensif lagi didalam melakukan sosialisasi, penyuluhan ke masyarakat mengenai bank sampah, pemilahan sampah organik dan anorganik dan mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. peran Kelurahan dalam melakukan pembinaan langsung terhadap RT dan RW baik melalui dialog dan sosialisasi langsung juga perlu lebih diintensifkan, hal ini sesuai dengan Teori dari Chris Anshel dan Allison Gash yang menyatakan bahwa proses membangun komitmen, proses dialog dalam suatu tata kelola kolaborasi tidak hanya dilakukan sekali saja namun harus merupakan suatu proses yang berulang. Selain sosialisasi perlu dilakukan pendampingan di masyarakat, untuk pendampingan bisa juga dilakukan pengembangan kolaborasi dengan menjalin kerja sama dengan *Non Government Organization* atau LSM yang bergerak di bidang lingkungan hidup.
2. Mengoptimalkan performa dan motivasi petugas sampah RT dan RW dengan mengadakan sosialisasi,

pembinaan berkesinambungan dan mengusahakan peningkatan kesejahteraan mereka serta memperlengkapi mereka dengan pra sarana yang lebih memadai seperti mengakomodir setiap RW dengan satu gerobak motor sampah yang tentunya dapat meringankan beban serta meningkatkan mobilitas dari petugas sampah RT dan RW. Selain itu juga dapat dilaksanakan rembuk dan dialog bersama antara petugas sampah RT RW, pihak Kelurahan dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat perihal batasan komitmen waktu pengangkutan dan kedatangan truk sampah dan perbaikan manajemen pengangkutan sampah.

3. Kedepannya bisa dicoba untuk mengadakan perlombaan kebersihan lingkungan antar RW atau RT hal ini dengan pertimbangan melihat contoh yang sudah ada, lingkungan yang tertata karena ketepatan menjadi lokasi Kampung Branding dan Kampung warna- warni di RW 07 dan 06 Kelurahan Jembatan Lima, karena wilayahnya telah tertata, secara tidak langsung hal tersebut mempengaruhi mentalitas warganya untuk tidak membuang sampah sembarangan dan mau berpartisipasi dalam kegiatan pengecatan mural dan lebih aktif lagi berpartisipasi dalam kerja bakti.

DAFTAR REFERENSI

Buku :

- Cheema, Shabbir, Rondinelli, Dennis. A (2007) *Decentralizing governance: emerging concepts and practices*, Brookings Institution Press
- Persadi (2013) *Manajemen Penanganan Sampah Bernilai Ekonomis*, Jakarta
- Suhandy, Idup dan Desi, Fernanda. (2001). *Dasar-Dasar Kepemerintahan yang Baik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Dokumen Lembaga :

- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan sampah

- Peraturan Gubernur Nomor 251 Tahun 2014
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kelurahan
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Nomor 169 Tahun 2015 Tentang
Penanganan Prasarana dan Sarana
Umum Tingkat Kelurahan
- Pusat Penelitian dan Pengembangan
Pemukiman Kementrian PU, 2010
Modul Pengelolaan Sampah 3R. 3
April 2010
[http://puskim.pu.go.id/modul-
sampah-3r/](http://puskim.pu.go.id/modul-sampah-3r/)
- Badan Pusat Statistik Kota Administrasi
Jakarta Barat. Kota Jakarta Barat
Dalam Angka 2017. Jakarta : CV.
Josevindo
- Kelurahan Jembatan Lima Kota Administrasi
Jakarta Barat, Laporan Kewilayahan
Tahun 2015 s.d Tahun 2017.
- Satuan Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup
Kecamatan Tambora, Laporan
Tahunan Tahun 2015 sd 2017
- Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Adm
Jakarta Barat, Laporan Bulanan Seksi
P3SM 31 Mei 2018.

Jurnal :

- Ansell, Chris dan Alison Gash. (2007).
Collaborative Governance in Theory
and Practice, urnal of Public
Administration Research and Theory,
Advance Access Published, 18: 543–
571
- CIFOR. 2005. Achievements of the Center for
International Forestry Research
(CIFOR) 1998– 2005. Bogor,
Indonesia, CIFOR. 53p
- Vangen, Siv, and Chris Huxham. 2003a.
Enacting leadership for collaborative
advantage: Dilemmas of ideology and
pragmatism in the activities of
partnership managers. British Journal
of Management 14:S61–76.